



2024

LAPORAN KINERJA



BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN**



PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA BALAI GAKKUM LHK WIL. KALIMANTAN
TAHUN 2024**

Samarinda, 15 Januari 2025

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
OLEH:

KEPALA BALAI,



David Muhammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya karena dengan rahmat-Nya Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum) LHK Wilayah Kalimantan dapat disusun.

Laporan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang pencapaian berbagai kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai gambaran kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Kami berharap adanya masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan serta perbaikan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja ke depan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya pihak-pihak yang memerlukan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya.

Samarinda, 15 Januari 2025

Kepala Balai,



David Muhammad, S.Sos., M.H.
NIP. 19730707 200003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tugas dan Fungsi.....	6
1.3 Struktur Organisasi.....	7
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Anggaran.....	9
1.6 Sarana dan Prasarana.....	11
1.7 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	13
BAB 2.....	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	17
2.2. Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024.....	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
BAB 3.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Pengukuran Kinerja.....	27
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.4 Realisasi Anggaran.....	51
BAB 4.....	56
PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Rekomendasi.....	56

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Perjalanan Perubahan Pagu Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024</i>	9
<i>Table 2. Anggaran Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2024</i>	10
<i>Table 3. Sarana dan Prasarama Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2024</i>	11
<i>Table 4. Sasaran Strategis dan IKU KLHK Tahun 2020-2024</i>	20
<i>Table 5. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024</i>	23
<i>Table 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	24
<i>Table 7. Kriteria Nilai Realisasi Kinerja</i>	26
<i>Table 8. Realisasi Capaian IKK Balai Gakkum 2020-2024</i>	26
<i>Table 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024</i>	28
<i>Table 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan PSLH 2024</i>	29
<i>Table 11. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	31
<i>Table 12. Capaian Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi 2024</i>	32
<i>Table 13. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	34
<i>Table 14. Capaian Kegiatan Penegakan Hukum Pidana 2024</i>	35
<i>Table 15. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	38
<i>Table 16. Rincian Kegiatan Menembak 2024</i>	39
<i>Table 17. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	41
<i>Table 18. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	44
<i>Table 19. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	48
<i>Table 20. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja</i>	51
<i>Table 21. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Jenis belanja</i>	52
<i>Table 22. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 Per Kegiatan</i>	54

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan</i>	7
<i>Gambar 2. Sebaran Pegawai Balai Gakkum Kalimantan berdasarkan jenis kelamin</i>	8
<i>Gambar 3. Sebaran Pegawai berdasar range usia</i>	8
<i>Gambar 4. Sebaran pegawai per seksi</i>	9
<i>Gambar 5. Pos Gakkum IKN</i>	15
<i>Gambar 6. Arahana Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2020-2024</i>	18
<i>Gambar 7. Skema Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Gakkum LHK 2020-2024</i>	21
<i>Gambar 8. Skema Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK 2020 - 2024</i>	22
<i>Gambar 9. Formula Pengukuran Kinerja</i>	25
<i>Gambar 10. Formula Efektivitas Capaian Kinerja</i>	27
<i>Gambar 11. Formulasi Efisiensi Capaian Kinerja</i>	27
<i>Gambar 12. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya</i>	33
<i>Gambar 13. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya</i>	36
<i>Gambar 14. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya</i>	40
<i>Gambar 15. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya</i>	43
<i>Gambar 16. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya</i>	47
<i>Gambar 17. Diagram Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024</i>	52
<i>Gambar 18. Realisasi Capaian Anggaran Per Output</i>	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Wilayah Kalimantan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa Balai Gakkum Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Gakkum Wilayah Kalimantan dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan prinsip *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2024, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Wilayah Kalimantan telah menyusun Laporan Kinerja yang berpedoman pada Memo Setditjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor M.217/SETPHLHK/PEHKT/REN.3.9/B/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pelaporan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Penilaian AKIP Tahun 2024 Ditjen Penegakan Hukum LHK.

1.2 Tugas dan Fungsi

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sangat diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terbentuklah UPT Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan mempunyai tugas sebagai berikut:

“melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan”

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya.
- e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan operasi pengamanan hutan.
- f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan.
- g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup.
- h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- j. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas disebutkan bahwa Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berlokasi di Samarinda. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terbagi menjadi 3 Seksi Wilayah, yaitu:

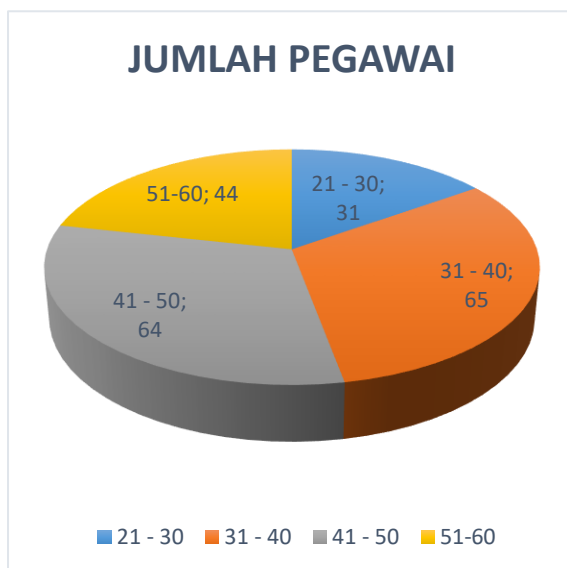
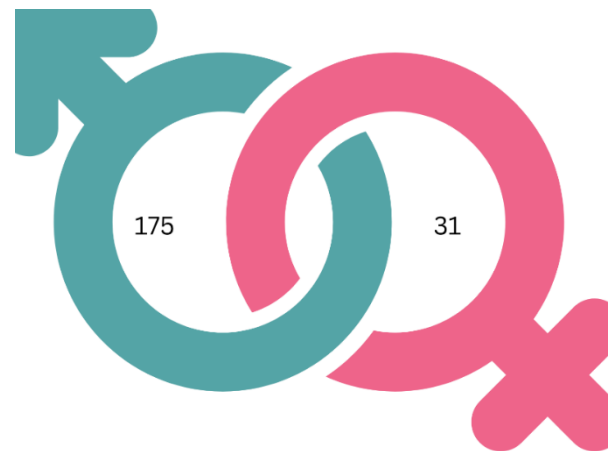
- Seksi Wilayah I berlokasi di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta memiliki kantor Pos Pelayanan Pengaduan di Banjarbaru;
- Seksi Wilayah II berlokasi di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta memiliki kantor Pos Pelayanan Pengaduan di Tanjung Selor dan Ibu Kota Nusantara;
- Seksi Wilayah III berlokasi di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Sumber Daya Manusia

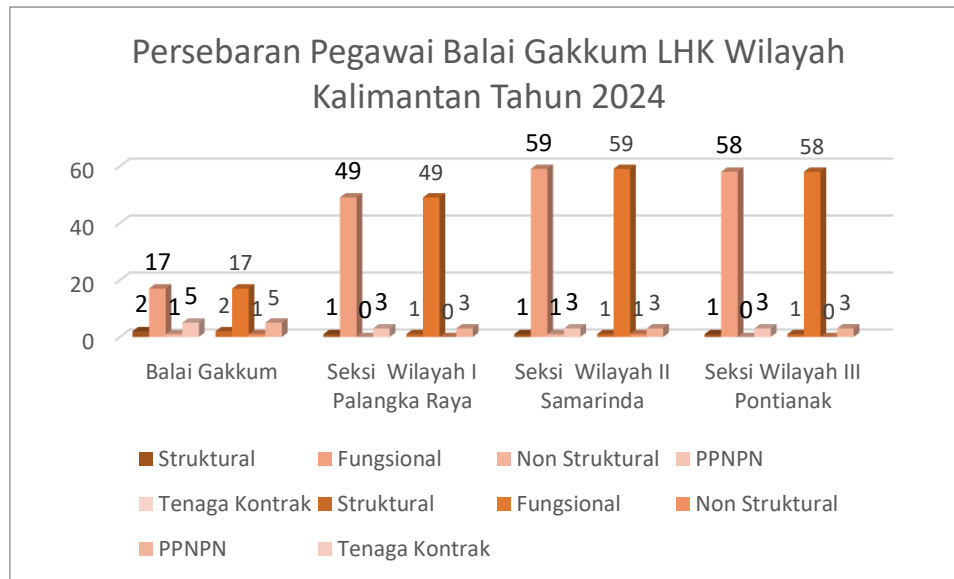
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta pencapaian target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki pegawai sebanyak 206 orang, yang terdiri dari 175 Laki – laki dan 31 Perempuan. Berdasarkan status kepegawaian sebanyak 177 orang berstatus ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS), 13 orang berstatus ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebanyak 14 orang dengan status PPNPN dan 2 orang Tenaga Kontrak (outsourcing). Di lihat dari

jabatannya terdiri 5 (lima) ASN Pejabat Struktural, 2 (dua) ASN Fungsional umum , 2 (dua) ASN Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, 3 (tiga) ASN Perencana, 1 (satu) ASN Analisis Kebijakan, 3 (tiga) ASN Analis Pengelola Keuangan APBN, 3 (tiga) ASN Pranata Keuangan APBN, 2 (dua) ASN Pranata Komputer, 3 (tiga) ASN Arsiparis, 1 (satu) ASN Analis SDM, 1 (satu) ASN Analis Hukum, 3 (tiga)ASN Pengendali Dampak Lingkungan, 141 ASN Fungsional Polisi Kehutanan, 20 ASN Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, 14 orang PPNP dan 2 orang Tenaga Kontrak. Selama tahun 2024 terdapat 11 orang pengangkatan PPPK terdiri dari 2 orang Perencana, 3 orang Pengendali Dampak lingkungan, 3 orang Arsiparis, 1 orang Analis Hukum, 1 orang Analis SDM. Berikut adalah sebaran pegawai ASN dan PPNP Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan :

Gambar 2. Sebaran Pegawai Balai Gakkum Kalimantan berdasarkan jenis kelamin



Gambar 3. Sebaran Pegawai berdasar range usia



Gambar 4. Sebaran pegawai per seksi

1.5 Anggaran

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tugas dan fungsinya. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah Menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki pagu anggaran awal sebesar Rp 66.412.234.000 dan pagu anggaran akhir sebesar Rp 63.536.104.000. Selama tahun 2024 terdapat beberapa kali revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu anggaran, yaitu blokir belum ada persetujuan dari Bappenas, blokir *Automatic Adjustment* dan Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan Amanat Presiden RI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Perjalanan Perubahan Pagu Anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024

Revisi ke-	Pagu anggaran (Rp)	Tanggal penetapan DIPA	Keterangan
0	66.412.234.000	28 November 2022	DIPA awal
1	66.412.234.000	16 Januari 2024	Pagu Tetap. Automatic Adjustment Belanja Ditjen PHLHK. Blokir AA 1.150.000.000
2	66.412.234.000	29 Januari 2024	Pagu tetap, blokir kegiatan LH belum ada persetujuan dari Bappenas
3	64.412.234.000	27 Juni 2024	Pemotongan Belanja Modal
4	63.536.104.000	9 Oktober 2024	Pemenuhan Belanja Pegawai Ditjen Gakkum KLHK
5	63.536.104.000	11 November 2024	Pagu tetap. Penghematan anggaran belanja perjalanan dinas lingkup Ditjen Gakkum LHK TA 2024. Self blocking perjadi 1.450.000.000

Table 2. Anggaran Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2024

Kode	Rencana Kegiatan	Pagu Bulan Januari	Pagu Akhir Bulan Desember
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	-	440.000.000
5429.QCE.001	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	580.000.000	440.000.000
051	Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	240.000.000	-
052	Penghitungan Kerugian LH / Masyarakat	60.000.000	37.035.000
053	Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	280.000.000	402.965.000
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	4.205.620.000	4.070.139.000
5430.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	4.205.620.000	4.070.139.000
051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	1.259.600.000	894.989.000
052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	770.000.000	361.096.000
053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.176.020.000	2.814.054.000
5431	Penegakan hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.562.840.000	9.339.435.000
5431.QCE.001	Kasus Tindak Pidana LHK P21	9.562.840.000	9.339.435.000
051	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	3.704.000.000	1.867.042.000
052	Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	4.426.400.000	5.982.288.000
053	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	832.440.000	305.830.000
054	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400.000.000	352.923.000
055	Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	200.000.000	831.352.000
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	11.032.597.000	9.337.148.000
5428.DCE.001	Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200.000.000	194.539.000
051	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	194.539.000
5428.QHD.001	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	6.675.140.000	5.484.636.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	1.893.140.000	1.718.734.000
052	Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	4.782.000.000	3.765.902.000
5428.QHD.002	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4.157.457.000	3.657.973.000
051	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.177.152.000	719.077.000
053	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	150.000.000	11.850.000
054	Operasi Pembalakan Liar	1.199.205.000	1.204.925.000
055	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1.031.100.000	1.156.386.000
057	Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	600.000.000	565.735.000

Kode	Rencana Kegiatan	Pagu Bulan Januari	Pagu Akhir Bulan Desember
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.031.177.000	40.349.381.000
5427.EBA.962	Layanan Umum	2.300.000.000	2.108.335.000
053	Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.300.000.000	2.108.335.000
5427.EBA.994	Layanan Perkantoran	29.591.821.000	31.101.691.000
001	Gaji dan Tunjangan	26.366.000.000	27.675.870.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.225.821.000	3.425.821.000
5427.EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9.139.356.000	7.139.356.000
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.323.000.000	1.650.080.000
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	450.000.000	298.300.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	766.356.000	2.153.167.000
054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	6.600.000.000	3.037.809.000

1.6 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan sampai dengan per 31 Desember 2024 didukung dengan sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada di Kantor Balai Gakkum dan beberapa di Seksi Wilayah Palangkaraya, Samarinda dan Pontianak dengan beberapa kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat dengan rincian adalah sebagai berikut:

Table 3. Sarana dan Prasarana Balai Gakkum Kalimantan Tahun 2024

No	Nama barang	Kondisi 2024			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
1	Bangunan gedung kantor permanen	8	-	-	8
2	Bangunan bengkel/hangar permanen	1	1	-	2
3	Bangunan gedung tempat ibadah permanen	1	-	-	1
4	Bangunan gedung pertemuan	1	-	-	1
5	Gedung Pos Jaga Permanen	1	-	-	1
7	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	2	-	-	2
8	Asrama Permanen	1	-	-	1
9	Bangunan Menara/Bak	1	-	-	1
10	Kendaraan roda 4	41	1	-	42
11	Kendaraan roda 2	63	4	-	67
12	Handy cam	8	-	-	8
13	Kamera udara (drone)	19	-	-	19
14	Handy talky (HT)	39	-	-	39
15	Kamera digital	35	-	-	35
16	GPS	59	-	-	59

No	Nama barang	Kondisi 2024			Jumlah
		Baik	Rusak ringan	Rusak berat	
17	Personal computer (PC)	31	-	-	31
18	Laptop	145	2	1	148
19	Printer	96	2	-	98
20	Scanner	29	-	-	29
21	Mesin scanning	2	-	-	2
22	Plotter	3	-	-	3
23	External hardisk	37	-	-	37
24	Genset	4	-	-	4
25	UPS	21	-	-	21
26	Senjata laras panjang	63	1	-	64
27	Helm tempur	30	-	-	30
28	Rompi anti peluru	30	-	-	30
29	Pompa Air	2	-	-	2
30	Lemari Penyimpanan	31	-	-	31
31	Lemari Kayu	28	2	-	30
32	Rak Besi	1	-	-	1
33	LCD Projector/Infocus	10	-	-	10
34	Meja Kerja Besi/Metal	37	-	-	37
35	Meja Kerja Kayu	140	1	-	141
36	Kursi Besi/Metal	270	-	-	270
37	Sice	28	-	-	28
38	Meja Rapat	17	-	-	17
39	Mesin Pemotong Rumput	6	-	-	6
40	Mesin Cuci	5	-	-	5
41	Lemari Es	17	-	-	17
42	A.C. Split	91	1	-	92
43	Televisi	58	-	-	58
44	Sound System	24	-	-	24
45	Video Conference	10	-	-	10
46	Telephone Mobile	28	-	-	28
47	Kursi Zeis	137	-	-	137

1.7 Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum memiliki banyak faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Identifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- Permasalahan Internal

- Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi tantangan penegakan hukum LHK, mengingat pertumbuhan kapasitas lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan problematik yang mesti dihadapi, seperti kasus kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman hayati yang cenderung meningkat.
- Kurangnya pendidikan dan latihan dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas, serta keterampilan untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik korupsi.
- Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang lemah, serta mekanisme pengendalian yang kurang baik akan mudah terjadinya pelanggaran etika atau hukum
- Kurangnya inisiatif untuk membangun budaya organisasi yang mendorong integritas, termasuk penghargaan dan pengakuan bagi individu atau unit dalam mempraktikkan nilai-nilai integritas
- Sumber daya aparatur pada tingkat operasional belum memadai relatif dibandingkan dengan tantangan penegakan hukum LHK. Jumlah PPNS dan PPLH belum cukup untuk menghadapi tantangan dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana.
- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.
- Akses informasi bagi public yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan dan peran serta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.

- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- **Permasalahan Eksternal**
- Adanya kebijakan dan regulasi yang selalu berubah ubah dan sering terjadi tumpang tindih kebijakan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam bekerja.
 - Kurangnya pengawasan dari pihak eksternal seperti lembaga anti-korupsi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi
 - Perlu adanya komitmen dari pihak-pihak dan instansi terkait untuk menerapkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasis multirezim hukum (*multidoor*).
 - Besarnya harapan rakyat akan keadilan, kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi.
 - Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
 - Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal.
 - Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

1.8 Ibu Kota Negara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai *milestone* Indonesia Maju 2045 yang ditopang dengan pembangunan Indonesia Sentris yang mendukung terciptakan pertumbuhan inklusif dan membangun kota baru yang *smart*, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi Indonesia yang berbasis Inovasi dan berbasis teknologi dan *green economy*.

Balai Gakkum Kalimantan berkomitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan cara melakukan pencegahan dan pengamanan wilayah IKN dari aktivitas pertambangan ilegal dengan harapan dapat menghentikan aktivitas pemanfaatan lingkungan hidup yang bersifat merusak dan tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup untuk pengelolaan

dan perlindungan lingkungan hidup. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tidak mendapatkan anggaran yang khusus untuk menopang IKN, tetapi anggaran yang ada di Seksi Wilayah II Samarinda dapat dipergunakan untuk kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi, Operasi Pengamanan Kawasan, yang memang apabila diperlukan. Selain itu, dengan terbentuknya Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Aktivitas Illegal Bidang Pertambangan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dengan melibatkan pada Kementerian/Lembaga dan Unsur Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dapat membentuk sinergisitas antar *stakeholder* dalam membantu Otorita IKN untuk mengamankan wilayah IKN dari aktivitas pemanfaatan pertambangan secara ilegal. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan juga memiliki POS Gakkum yang berada di Sepaku di daerah peyangga IKN.



Gambar 5. Pos Gakkum IKN

1.9 Transisi Kementerian / Lembaga

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi dipisah menjadi dua Kementerian; Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Penataan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kabinet untuk periode 2024 -2029 yang diresmikan oleh Presiden RI terpilih pada 21 Oktober 2024.

Dengan terjadinya pemisahan ini, diharapkan kedua Kementerian dapat menjalankan perannya masing-masing secara lebih efektif. Kementerian Kehutanan kini fokus pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bertugas untuk memonitor dan mengendalikan masalah pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan yang lebih luas.

1.10 Automatic Adjustment

Dalam rangka menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik, pada tahun anggaran 2024, pemerintah Kembali melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment*. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memblokir sebagian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum prioritas. Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun dan diarahkan untuk memprioritaskan belanja yang benar-benar penting.

Automatic Adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini, melalui prioritas belanja. Adapun dasar hukum yang mengatur seperti Memorandum Menteri LHK No. M.1/MENLHK/SETJEN/ROCAN/REN.0.1/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 perihal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian LHK TA .2024.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan *Automatic Adjustment* berasal dari Rupiah murni, antara lain: belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya), belanja modal yang dapat diefisienkan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, merupakan komitmen bagi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja bertujuan untuk menciptakan arah dan focus yang jelas, memberikan kerangka kerja yang terstruktur, dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif. Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan telah berkomitmen kepada Direktur Jendral PHLHK untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan yang dalam hal ini adalah target kinerja sebagaimana yang ditetapkan diawal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024. Setiap awal tahun setelah DIPA disahkan oleh Kementerian Keuangan, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Menyusun laporan kinerja tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan 2020 – 2024 (Revisi) merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Muatan pada Renstra Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan ditetapkan Sesuai dengan isi Materi Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPENAS mengenai Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2020-2024, berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 yang kemudian ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019, tidak ada visi dan misi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta jajarannya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

- Misi:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
 8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.



Gambar 6. Arahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2020-2024

Secara umum, KLHK harus turut memberikan kontribusi dalam tercapainya visi dan seluruh misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024. Akan tetapi, KLHK mengemban tugas yang lebih terperinci untuk mencapai misi nomor empat, yakni terhadap pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, penyusunan Renstra KLHK 2020-2024 juga mengacu pada Arahan Presiden dan 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan. Keselarasan ini dipaparkan dalam Arahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Berpedoman pada makna dan rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, rumusan Visi KLHK yang dituangkan dalam Renstra KLHK yakni "Terwujudnya

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, misi ke-empat dari rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden menjadi rumusan misi yang paling dan sangat relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan KLHK. Untuk itu, Misi KLHK yang ditetapkan dalam Renstra KLHK adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam askes kelola hutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan seluruh acuan dan arahan Renstra tersebut, KLHK merancang 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis KLHK yang diuraikan dalam Renstra KLHK 2020-2024. Tujuan KLHK merupakan harapan yang akan dicapai dan diperinci lebih lanjut menjadi Sasaran Strategis KLHK dengan masing-masing indikator kinerja utamanya. Empat rumusan tujuan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi, dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni sebagai akibat kumulatif dalam jangka waktu menengah hingga panjang, dari terealisasinya program pembangunan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkup KLHK dalam periode 2020-2024. Empat rumusan Sasaran Strategis KLHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra KLHK Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

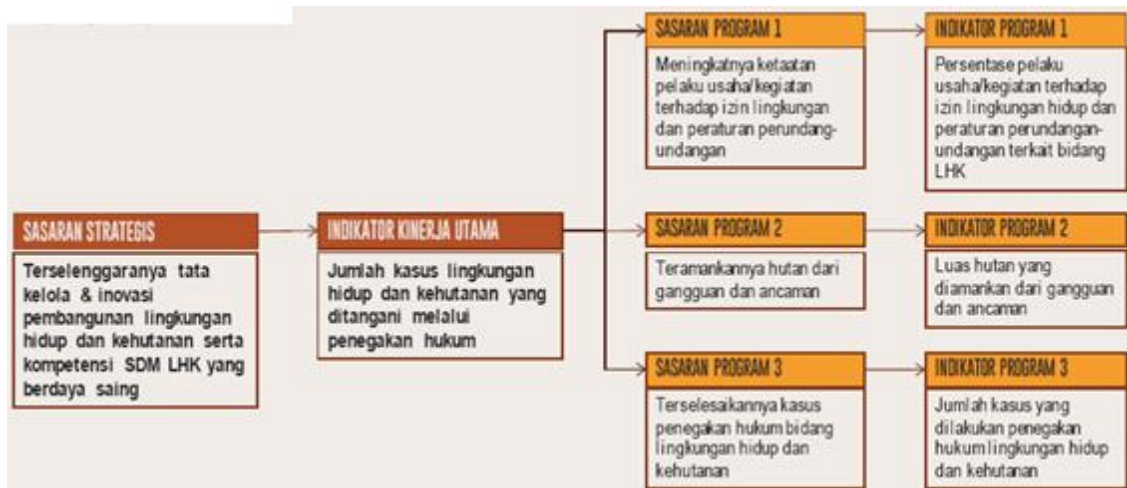
Table 4. Sasaran Strategis dan IKU KLHK Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah 3. Penurunan laju deforestasi 4. Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) 5. Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya 6. Luas kawasan bernilai konservasi tinggi (HVC – High Conservation Values)
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional 8. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i> 9. Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional KLHK
3. Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	10. Luas kawasan hutan dengan status penetapan 11. Luas kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 12. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	13. Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan 14. Jumlah kasus LHK yang ditangani melalui penegakan hukum 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE) 16. Hasil Litbang yang inovatif atau implementasi 17. Nilai kinerja reformasi birokrasi 18. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 19. Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK 20. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK

Setelah menetapkan Sasaran Strategis KLHK, Menteri LHK juga mendefinisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator pencapaian sasaran strategis. Untuk Renstra 2020-2024, KLHK menetapkan sebanyak 20 IKU. Sasaran Strategis KLHK yang diturunkan langsung terhadap Ditjen Gakkum LHK adalah sasaran strategis ke-empat, yaitu “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan langsung untuk Ditjen Gakkum LHK adalah IKU 14, yakni “Jumlah Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani melalui Penegakan Hukum”.

Indikator Kinerja Utama ini diturunkan menjadi Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Masing-masing sasaran memiliki indikator tersendiri sebagai acuan tercapai atau tidak tercapainya suatu sasaran yang ditetapkan sebagai rencana strategis. Ditjen Gakkum LHK lantas menentukan 3 (tiga) Sasaran Program dalam Renstranya: Meningkatkan ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan; Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman; terselesaikannya kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

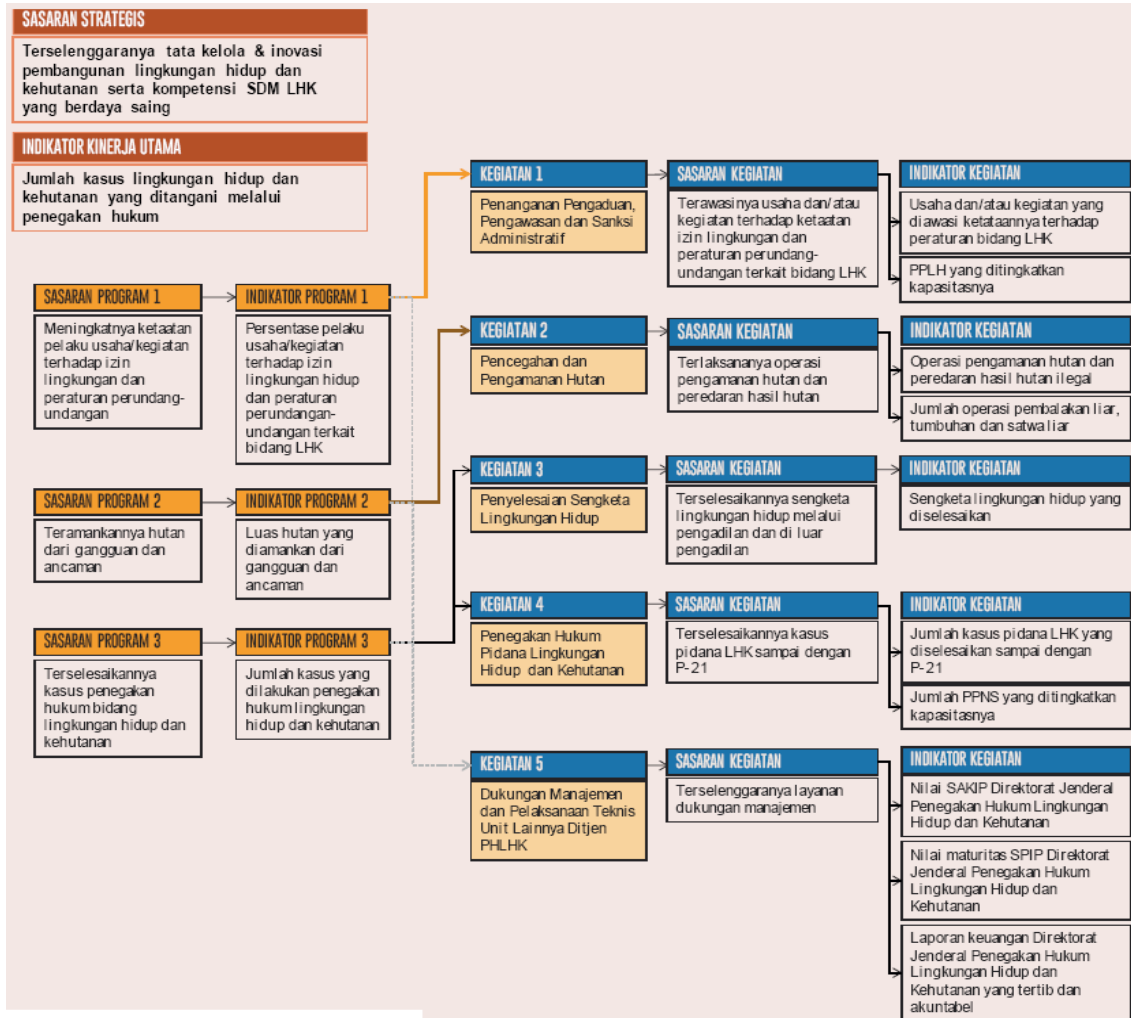
Untuk menilai tingkat capaian sasaran program yang ditekankan oleh Ditjen Gakkum LHK, indikator kinerja program yang kuantitatif untuk masing-masing sasaran pun telah didefinisikan seperti pada gambar berikut.



Gambar 7. Skema Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen Gakkum LHK 2020-2024

Untuk melaksanakan Sasaran Program tersebut, Ditjen Gakkum LHK memiliki lima unit kegiatan yang beroperasi di dalam organisasi ini, yaitu Unit Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA), Pencegahan dan Pengamanan Hutan (PPH), Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHP), serta Dukungan Manajemen dan Pelaksana Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK (Dukman). Masing-masing kegiatan telah menyepakati untuk memiliki satu sasaran kegiatan. Unit Kegiatan PPSA, PPH, dan PHP menentukan dua indikator kinerja untuk sasaran

kegiatan unitnya. Unit Kegiatan PSLH hanya menentukan satu indikator untuk mengukur capaian sasaran kegiatannya. Sedangkan Dukman, memiliki tiga indikator kinerja untuk pelayanan dukungan terhadap unit kerja lainnya. Lebih jelasnya, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 8. Skema Sasaran Kegiatan & Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Gakkum LHK 2020 - 2024

2.2. Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024

Rencana Strategis Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan Renstra PHLHK tahun 2020 - 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024. Rencana kerja ini memuat arah kebijakan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan selama Tahun 2024 sebagai komitmen dalam pencapaian sasaran kegiatan. Rencana Kerja ini juga menjadi acuan menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai instrumen mengukur kemajuan pencapaian tujuan dan kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Table 5. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REVISI TARGET
Terselesainya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan	2 Perkara	2 Perkara
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	20 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	12 Operasi
	Peningkatan Kapasitas Polhut	15 Orang	15 Orang
Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	130 Badan Usaha	130 Badan Usaha
Terselesainya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara	40 Perkara
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	96,41 Poin	81,00 Poin

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen tersebut memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen tersebut untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Indikator Penilai Kinerja (IPK) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

Table 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (dalam ribu)
Terselesaikannya Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan	2 Perkara	440.000
Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	9.337.148
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	
	Peningkatan Kapasitas Polhut	15 Orang	
Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	130 Badan Usaha	4.070.139
Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan P-21	Jumlah kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara	9.339.435
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	81,00 Poin	40.349.382

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan merupakan UPT dari Ditjen Gakkum LHK sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Gakkum LHK. Adapun kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya Ditjen Gakkum LHK.
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Untuk mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

$$C = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Gambar 9. Formula Pengukuran Kinerja

dimana C: tingkat capaian target kinerja, R: realisasi capaian target kinerja dan T: Target kinerja.

Untuk memudahkan dalam mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, nilai capaian target kinerja dikelompokkan sebagai berikut.

Table 7. Kriteria Nilai Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Ket
1.	$X > 85 \%$	Sangat Berhasil	Hijau
2.	$70 < X < 85 \%$	Berhasil	Biru
3.	$55 < X < 70 \%$	Cukup Berhasil	Kuning
4.	$X < 55 \%$	Tidak Berhasil	Merah

Table 8. Realisasi Capaian IKK Balai Gakkum 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKK				
		2020	2021	2022	2023	2024
5429.QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	-	-	-	2	2
5430.DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	-	21	19	22	-
5430.QIH	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	99	119	133	167	135
5431.DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	3	4	10	44	-
5431.QCE	Kasus Tindak Pidana LHK P21	57	47	26	44	39
5428.DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	-	146	145	144	133
5428.QHD	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	-	21	15	29	25
5428.QHD	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan	233.805 Ha	-	-	-	-
5428.QHD	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20	20	8	17	31
5427.EBA	Layanan Umum	1	1	1	1	1
5427.EBA	Layan Perkantoran	1	1	1	1	1
5427.EBB	Layanan Sarana Internal	-	-	-	1	1

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas

A. Efektivitas

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan Capaian Kinerja fisik tahun berjalan dengan capaian kinerja Tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2024.

Efektivitas Capaian Kinerja

$$= \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Sebelumnya}}$$

Gambar 10. Formula Efektivitas Capaian Kinerja

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu:

- Rasio perbandingan > 1, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya;
- Rasio perbandingan = 1, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024, tetap/sama dengan tahun sebelumnya dan sama dengan kinerja tahun 2023;
- Rasio perbandingan < 1, menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektifitas kinerja 2024 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja 2023.

B. Efisiensi

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja (fisik) tahun berjalan dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2024. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2024.

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Keuangan Tahun Berjalan}}$$

Gambar 11. Formulasi Efisiensi Capaian Kinerja

Kriteria yang dijadikan pedoman efektivitas pencapaian kinerja, yaitu:

1. Rasio perbandingan > 1 atau = 1, artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2024 berjalan secara efisien;
2. Rasio perbandingan < 1, menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2024.

Capaian indikator kinerja kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Table 9. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH	%
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan	2 Perkara	2 Perkara	100,00
Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	25 Operasi	120,00
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	31 Operasi	120,00
	Peningkatan Kapasitas POLHUT	15 Orang	133 Orang	120,00
Penanganan pengaduan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	130 Perusahaan	135 Perusahaan	103,84
Penegakan Hukum Pidana LHK	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara	39 Perkara	97,50
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	81,00 Poin	84,70 Poin	104,56

Hasil pengukuran dari indikator kinerja unit kegiatan menunjukkan bahwa kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 sebesar **109.28%**.

Evaluasi digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pada saat kegiatan berlangsung, agar dapat dicari solusinya untuk pelaksanaan program/kegiatan di tahun selanjutnya. Agar hasil kinerja tidak bias, maka dalam perhitungan capaian kinerja sasaran, Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi arahan khusus untuk sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja yang melebihi 120%, diasumsikan capaiannya maksimal sebesar 120%.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis capaian kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berdasarkan tabel capaian indikator kinerja kegiatan dari 5 (lima) kegiatan adalah sebagai berikut:

3.3.1 IKK 1. Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 2 perkara telah terrealisasi tahun 2024 sebanyak 2 perkara, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.



Table 10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan PSLH 2024

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Penyelesaian
1	Jebolnya/Longsornya tanggul kolam limbah/void PT.SPP	Masyarakat Desa Bunyu Barat Terdampak (Kelompok A)	PT. SPP	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
2		Masyarakat Desa Bunyu Barat Terdampak (Kelompok B)		



Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk IKK Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan tidak ada dan hanya di Direktorat PSLH. Adapun penambahan IKK kepada setiap Balai lingkup Ditjen Gakkum dimulai pada tahun 2023 dengan adanya penambahan TOP UP PNBP sampai dengan tahun 2024 selama 2 tahun ini Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil menyelesaikan perkara Sengketa Lingkungan dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**



Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada Tahun 2023 Ditjen Gakkum LHK mempercayakan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan pada Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang dilakukan oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Capaian pada tahun 2023 dan 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target dengan hasil 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 2 perkara telah terealisasi tahun 2023 dan 2024 sebanyak 2 perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 telah dilakukan **upaya pencapaian** sebagai berikut :

1. Meminta bantuan pendampingan dari Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terkait arahan dan bimbingan dalam melakukan rangkaian kegiatan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
2. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan melakukan upgrade terhadap pegawai yang melakukan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan mengirim pegawai tersebut mengikuti Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas Negosiasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

3. Kinerja ASN BPPHLHK Wilayah Kalimantan dalam melakukan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang baik.

Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- Terbatasnya personil dalam menangani Sengketa Lingkungan Hidup di wilayah Kalimantan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang memahami proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- Memperbanyak melakukan kegiatan sharing session untuk membuka wawasan terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 11. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Penghitungan Kerugian LH / Masyarakat	37.035.000		36.971.900	99.83%
Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	332.965.000	70.000.000	329.946.170	99.09%
Total	370.000.000	70.000.000	366.918.070	99.17%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	100%	100%	99.28%	99.17%	1	1.01

3.3.2 IKK 2. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 103% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 130 Badan Usaha telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 135 Badan Usaha.



Table 12. Capaian Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi 2024

IKK	Komponen	Realisasi
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	Penanganan Pengaduan Perusahaan	48
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	27
	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	74
	Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi	13
Total		135



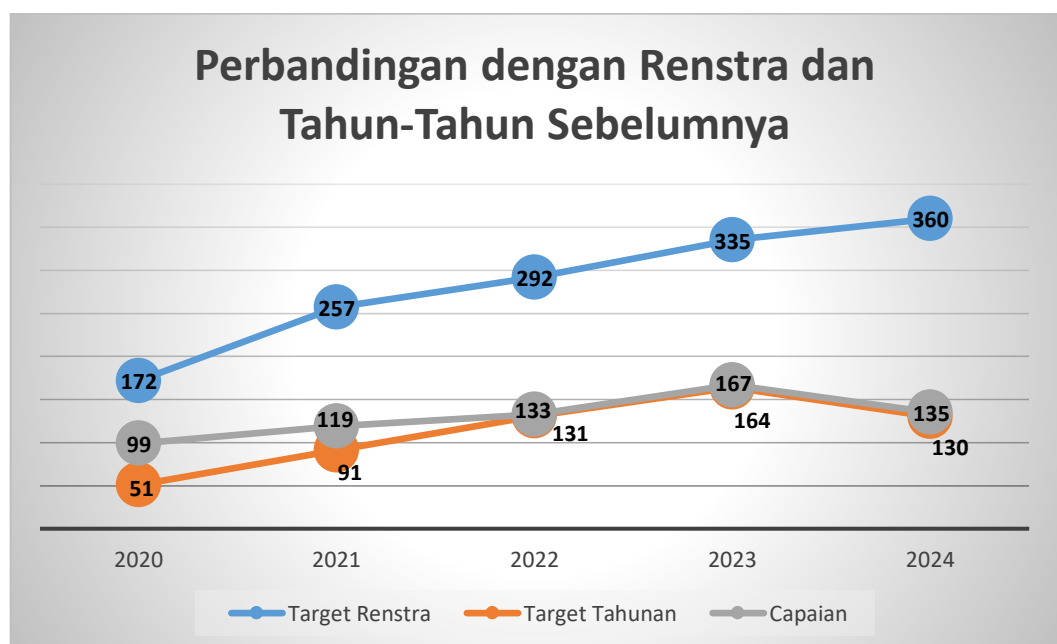
9 Oct 2024 10:45:51
3°41'31.32245"S 114°30'35.4348"E
Altitude: 75.0m
Speed: 0.6km/h

Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk IKK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berbeda dengan target tahunan yang diberikan tiap tahunnya. Target yang diberikan kepada satuan kerja setiap tahun menyesuaikan anggaran yang dialokasikan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang menjadi Capaian Output di Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan berupa Penanganan Pengaduan Perusahaan dan Pengawasan Reguler dan Sanksi Administrasi di setiap Seksi Wilayah 1, 2 dan 3.

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pelaksanaan IKK Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2020 – 2024. Setiap tahun Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah mencapai target yang telah diberikan dari Dirjen Gakkum LHK dengan persentase pencapaian lebih dari 100% dengan hasil **sangat berhasil**. Adapun target yang diberikan kepada satuan kerja menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan.



Gambar 12. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi LHK di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 telah dilakukan **upaya pencapaian** sebagai berikut:

1. Peran Aktif Masyarakat dalam pengaduan terkait pencemaran atau perusakan LHK yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan usaha.
2. Support dari Direktorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Sanksi Administrasi terkait data badan usaha atau kegiatan usaha yang memiliki perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup.

Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi LHK sebagai berikut :

- Terbatasnya personil dalam menangani Pengaduan dan Pengawasan di wilayah Kalimantan di banding jumlah badan usaha/ kegiatan usaha yang ditangani.
- Kewenangan pengawasan yang masih membedakan antara perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi LHK sebagai berikut :

- Memprioritaskan pengaduan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang paling berdampak terhadap Masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Peningkatan kapasitas personil Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan setiap tahun dalam mendukung kegiatan Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Sanksi Administrasi di wilayah Kalimantan.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 13. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Penanganan Pengaduan Perusahaan	894.989.000	-	889.706.084	99.41%
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	361.096.000	-	348.461.592	96.50%
Pengawasan Bidang LHK	2.314.054.000	500.000.000	2.308.067.896	78.13%
Total	3.570.139.000	500.000.000	3.046.235.572	85.32%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	101%	103%	99,54%	85,32%	1,01	1.20

3.3.3 IKK 3. Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 97.5% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 40 perkara telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 39 perkara.



Table 14. Capaian Kegiatan Penegakan Hukum Pidana 2024

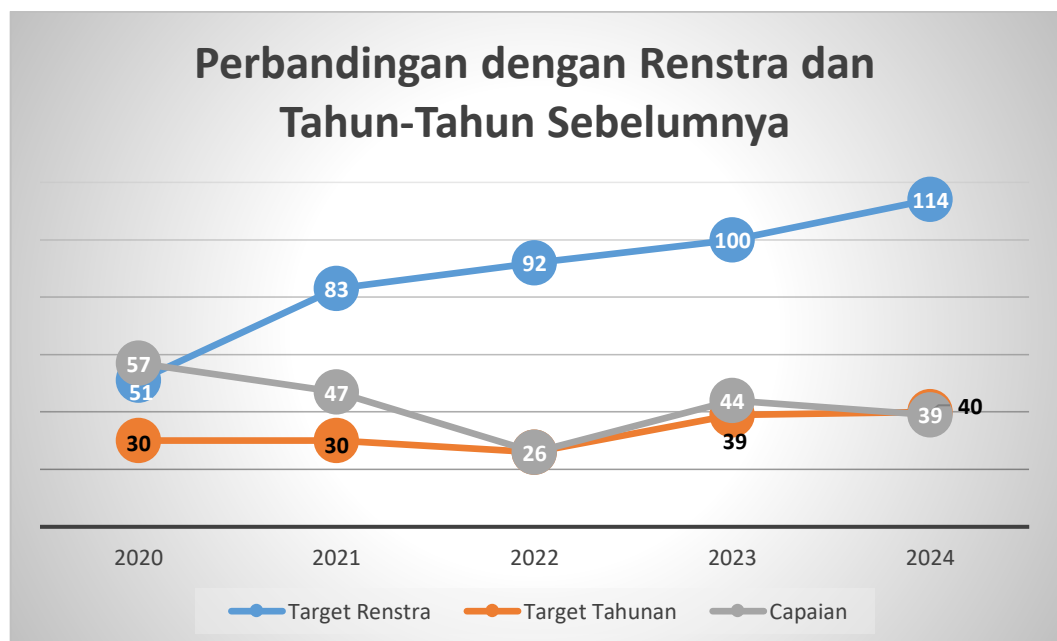
No.	Unit	Jenis Kasus			Jumlah
		Pencemaran Lingkungan Hidup	Pembalakan Liar	TSL	
1	Seksi Wilayah 1 Palangkaraya	1	5	4	10
2	Seksi Wilayah 2 Samarinda	-	8	3	11
3	Seksi Wilayah 3 Pontianak	-	8	10	18
Total		1	21	17	39

Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk IKK Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berbeda dengan target setiap tahunnya. Target yang diberikan kepada satuan kerja setiap tahun menyesuaikan anggaran yang dialokasikan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang menjadi Capaian Output di Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan berupa kegiatan Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK sampai dengan P-21 di setiap Seksi Wilayah 1, 2 dan 3.

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pelaksanaan IKK Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2020 -2024. Dari Tahun 2020 -2023 Capaian target dengan persentase 100% namun pada tahun 2024 belum mencapai target dikarenakan terkendala lewatnya wewenang PPNS untuk melanjutkan proses penyidikan dan pemenuhan P.19 mencari pelaku yg belum dapat dipenuhi oleh penyidik dan adanya perkara yg kalah dalam prapid.



Gambar 13. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Pidana LHK di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 telah dilakukan **upaya pencapaian** sebagai berikut :

1. Keterlibatan aktif stakeholder terkait, seperti Dinas Kehutanan, KPH, Kepolisian, Kejaksaan, dan ahli, memiliki dampak signifikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana LHK. Sinergi dan dukungan dari berbagai pihak membantu memastikan kelancaran proses penanganan kasus.
2. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki instrument Penegak Hukum yang kompeten. Di dalam strukturnya, Penyidik PNS tidak hanya dibiarkan bekerja sendiri, melainkan mereka mendapatkan dukungan yang efisien dari Unit Intelijen dan Unit Operasi.
3. Adanya peran aktif penyidik dalam pengembangan profesi serta didukung oleh pimpinan terhadap peningkatan kinerja PPNS.

Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi LHK sebagai berikut :

- Secara kuantitas SDM PPNS dilingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan masih belum optimal jika dibandingkan dengan banyaknya kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan
- Proses penyelidikan dan penyidikan terkadang terkendala oleh kedudukan saksi dan pelaku, yang memerlukan waktu dan anggaran lebih banyak. Tantangan ini dapat menghambat kecepatan dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus tersebut.
- Sarana dan prasana yang tersedia saat ini masih belum memadai dalam proses pengungkapan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan melibatkan para pihak atau instansi terkait guna meraih dukungan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan anggaran penyidikan secara berkala.
- Mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas PPNS melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berbasis teknologi.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 15. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	1.867.042.000	-	1.865.569.386	99,92%
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	5.832.288.000	150.000.000	5.642.090.543	96,73%
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	305.830.000	-	305.242.293	99,81%
Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	352.923.000	-	352.574.964	96,90%
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK	831.352.000	-	830.891.219	99,94%
Total	9.189.435.000	150.000.000	8.996.368.405	97,89%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penegakan Hukum Pidana LHK	100%	97.5%	99.31%	97.89%	0.97	0.99

3.3.4 IKK 4. Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 120% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 15 orang telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 133 orang, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.



Table 16. Rincian Kegiatan Menembak 2024

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Polhut	Lokasi Kegiatan
1	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah II	30 – 31 Mei 2024	49 Orang	Lap. Tembak Satbrimob Polda Kaltim
2	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah III	26 – 28 Juli 2024	44 Orang	SPN Polda Kalimantan Barat
3	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah I	25 - 26 November 2024	40 Orang	Lap. Tembak Satbrimob Polda Kalteng

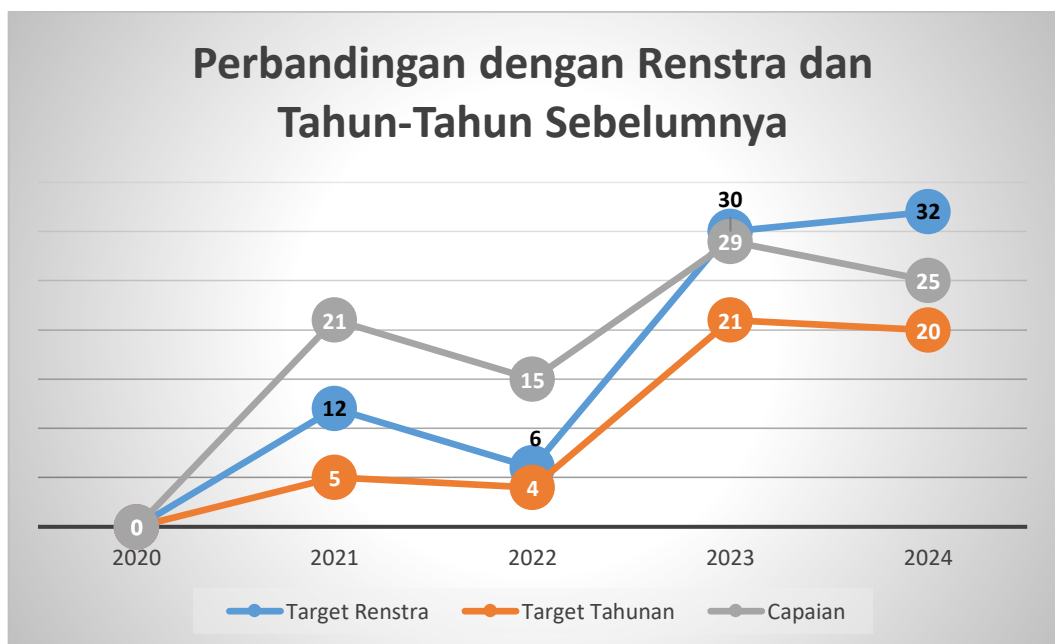


Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk IKK Jumlah Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berbeda dengan target tahunan yang diberikan oleh Dirjen Gakkum LHK tiap tahunnya. Target yang diberikan kepada satuan kerja setiap tahun menyesuaikan anggaran yang dialokasikan. Dan untuk Polisi kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya di Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan melaksanakan kegiatan Pelatihan Menembak di setiap Seksi Wilayah 1, 2 dan 3, serta pelatihan lain yang diadakan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK.

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pada Tahun 2020 untuk target peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan belum ada baik dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 maupun Perjanjian Kinerja 2020 sehingga kegiatan tersebut belum terlaksana. Dan untuk tahun 2021 – 2024 dalam Perjanjian Kinerja memuat Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan dimana jumlah capaian tersebut ada yang bertambah dan berkurang dikarenakan menyesuaikan jumlah Polisi Kehutanan yang berada di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.



Gambar 14. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 **upaya pencapaian** yang dilakukan yakni Peran Aktif Seksi Wilayah Lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan Pelatihan Menembak. Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan yaitu Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan berbagai macam pelatihan Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan yaitu dengan memberikan berbagai macam pelatihan selain pelatihan menembak yang dapat meningkatkan kesiap siagaan Polisi Kehutanan dalam menghadapi situasi kerja dan kondisi lapangan yang beragam.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 17. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	194.539.000	-	193.632.800	99.53%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	120%	120%	99.93%	99.53%	1	1.2

3.3.5 IKK 5 Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 120% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 20 operasi Pengamanan telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 25 Operasi, dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.

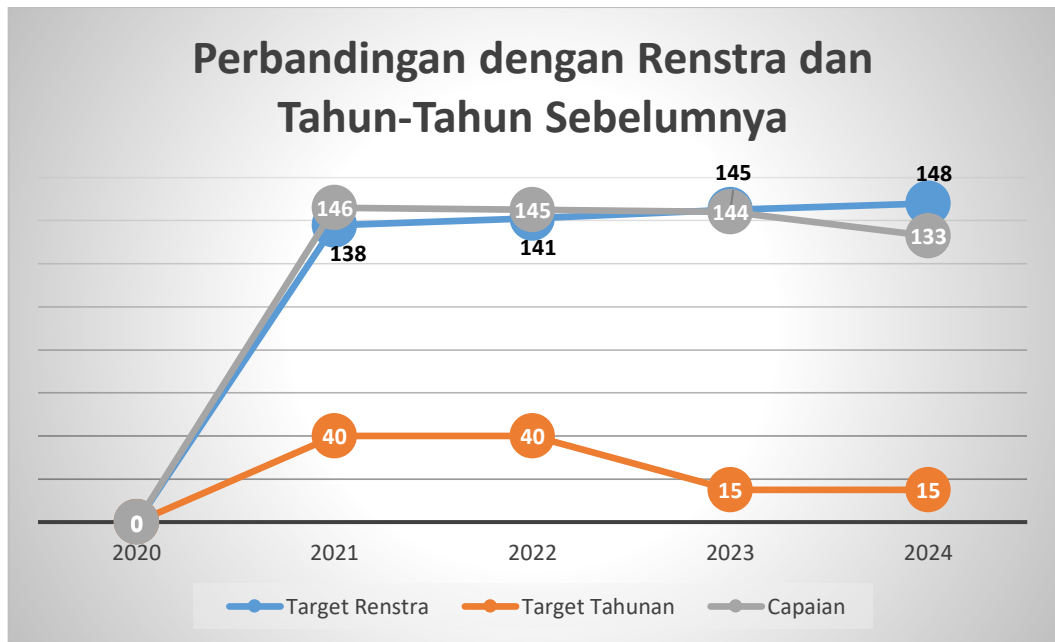


Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk IKK Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berbeda dengan target tahunan yang diberikan tiap tahunnya. Target yang diberikan kepada satuan kerja setiap tahun menyesuaikan anggaran yang dialokasikan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang menjadi Capaian Output di Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan berupa Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan di setiap Seksi Wilayah 1, 2 dan 3.

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pelaksanaan IKK Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2020 – 2024. namun untuk tahun 2020 dalam pencatatan pencapaian kegiatan operasi pengamanan memakai satuan hektar dan untuk tahun 2021 – 2024 untuk pencatatan sudah memakai satuan kali Operasi. Selama periode tersebut Balai Gakkum LHK Kalimantan telah mencapai target dengan persentase 100% dengan hasil **sangat berhasil**.



Gambar 15. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 telah dilakukan **upaya pencapaian** sebagai berikut :

1. Peran Aktif Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan Instansi terkait dalam melakukan penurunan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Sistem kerja yang sudah berjalan baik mulai dari puldasi dalam mendeteksi, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi ancaman kejahatan kepada pimpinan selaku *decision maker* serta tim operasi yang selalu siap dalam melaksanakan kegiatan yang telah diberikan.
3. Masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan tentang kejahatan LHK yang terjadi di wilayah Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan sebagai berikut :

- Terbatasnya personil dalam menangani Pencegahan dan Pengamanan di wilayah Kalimantan. Karena jumlah personil masih lebih sedikit dibandingkan dengan permasalahan dan luas Wilayah Kalimantan yang diamankan.
- Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi peredaran hasil hutan.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pengananan kermanan kawasan hutan.

- Melakukan pendataan secara lengkap terhadap lokasi yang terpantau tingkat kerawannya tinggi sebagai prioritas tipihut.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 18. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	1.718.734.000	-	1.713.223.946	99.68%
Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	3.285.902.000	480.000.000	2.805.902.000	85.39%
TOTAL	5.004.636.000	480.000.000	4.519.125.946	90.29%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	120%	120%	99.87%	90.29%	1	1.3



SIARAN PERS:

**GAKKUM KLHK TETAPKAN DUA OPERATOR EKSKAVATOR PENAMBANG
BATUBARA ILEGAL DI TAHURA BUKIT SOEHARTO**

Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah

Penambangan batubara secara illegal di Kawasan Tahura Bukit Soeharto ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan untuk melakukan Operasi Penegakan Hukum LHK Terhadap Laporan masyarakat tersebut.

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 2 Samarinda telah menetapkan MF (35) dan SS (36) selaku operator excavator sebagai tersangka penambangan batubara illegal di Kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Bersama BKSDA Kalimantan Timur berhasil melakukan tangkap tangan pelaku penambangan batubara illegal di dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser.

Dalam operasi tersebut berhasil mengamankan 3 (tiga) pelaku yaitu T (25) selaku Operator alat berat, F (25) selaku mekanik dan S (24) selaku pengaman kegiatan. Selain itu, juga mengamankan 1 (satu) unit excavator yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembuatan parit dan pembersihan disekitar lokasi yang akan ditambang



Tim Operasi SPORC Brigade Enggang BPPHLHK Kalimantan, Sekwil II Samarinda bersama BKSDA Kalimantan Timur berhasil tangkap tangan pelaku penambangan batubara illegal di dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Adang. Pelaku terancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.

3.3.6 IKK 6 Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 120% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 12 operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 31 Operasi.

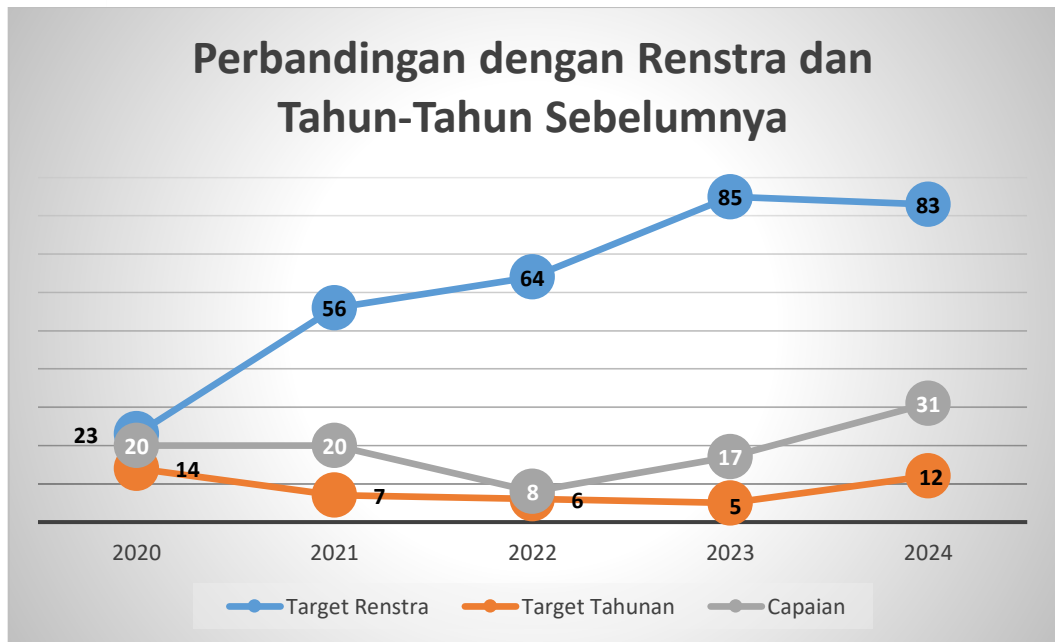


Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berbeda dengan target tahunan yang diberikan setiap tahunnya. Target yang diberikan kepada satuan kerja setiap tahun menyesuaikan anggaran yang dialokasikan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang menjadi Capaian Output di Balai Gakkum LHK wilayah Kalimantan berupa Operasi Pembalakan liar dan Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar di setiap Seksi Wilayah 1, 2 dan 3.

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2020 – 2024. setiap tahun Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah mencapai target yang telah diberikan dari Dirjen Gakkum LHK dengan persentase pencapaian lebih dari 100% dengan hasil sangat berhasil. Adapun target yang diberikan kepada satuan kerja menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan.



Gambar 16. Perbandingan dengan renstra dan tahun tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 telah dilakukan **upaya pencapaian** sebagai berikut:

1. Peran Aktif Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dengan Instansi terkait dalam melakukan penurunan tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Sistem kerja yang sudah berjalan baik mulai dari puldasi dalam mendeteksi, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi ancaman kejahatan kepada pimpinan selaku *decision maker* serta tim operasi yang selalu siap dalam melaksanakan kegiatan yang telah diberikan.
3. Masyarakat berperan aktif dalam menyampaikan pengaduan tentang kejahatan LHK yang terjadi di wilayah Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan

Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 selama pelaksanaan kegiatan Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut :

- Terbatasnya personil dalam menangani Pencegahan dan Pengamanan di wilayah Kalimantan. Karena jumlah personil masih lebih sedikit dibandingkan dengan permasalahan dan luas Wilayah Kalimantan yang diamankan.
- Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk melakukan operasi pengamanan kawasan hutan dan operasi peredaran hasil hutan.

Serta **perbaikan kinerja** kedepan selama pelaksanaan sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kejahatan TSL yang semakin masih dengan berbagai modus.

- Melakukan pendataan secara lengkap terhadap lokasi yang terpantau tingkat kerawannya tinggi sebagai prioritas tipihut.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 19. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	469.077.000	250.000.000	219.077.000	46.70%
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	11.850.000	-	11.489.000	99.95%
Operasi Pembalakan Liar	1.204.925.000	-	1.204.169.481	99.94%
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	756.386.000	400.000.000	356.386.000	47.11%
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	565.735.000	-	560.947.866	99.15%
TOTAL	3.007.973.000	650.000.000	2.352.069.347	78.19%

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Jumlah operasi Pembalakan Liar dan TSL	120%	120%	99.87%	78.19%	1	1.5

Pengembangan operasi penindakan dan penyelidikan 55 kontainer kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong Surabaya asal Berau Kalimantan Timur. Dugaan tindak pidana illegal logging dilakukan oleh beberapa industry pengolahan kayu di Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau

Diketahui bahwa pada industry pengolahan kayu CV. AK ditemukan bulat tanpa Id Barcode yang diduga merupakan kayu bulat ilegal sebagai bahan baku industry dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, tidak terdapat kesesuaian jenis kayu antara dokumen LMKB dengan catatan pengukuran (tallysheet) serta tidak terdaftar pada aplikasi SIPUHH online dan penggunaan Nota Angkutan dalam proses pengangkutan dan pengirima kayu olahan.



**BONGKAR JARINGAN KAYU ILEGAL BERAAU-SURABAYA
GAKKUM KLHK TETAPAN DUA TERSANGKA**



OPERASI TSL

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil menggagalkan pengangkutan 5.003 ekor burung di sekitar Kabupaten Banjar pada tanggal 5 Juli 2024. Sebanyak 837 ekor diantaranya adalah jenis burung yang dikategorikan sebagai satwa dilindungi yaitu Beo, Cililin, Serindit, Cucak Hijau.

Pelaku kegiatan pengangkutan burung-burung tersebut adalah AI (44) dan AH (22) yang melakukan pengangkutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil.

3.3.7 IKK 7 Layanan Dukungan Manajemen Internal

Analisis 1. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024

Pada tahun 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berhasil mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan hasil 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil** dari target 1 Layanan dan telah terealisasi tahun 2024 sebanyak 1 Layanan.



Analisis 2. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra)

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal dalam Rencana Strategis 2020 – 2024 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah sesuai dengan target tahunan yang diberikan setiap tahunnya. Layanan Dukungan Manajemen Internal harus ada di setiap satuan kerja karena berkaitan dengan pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai serta Operasional perkantoran selama 1 tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal di Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 **upaya pencapaian** yang dilakukan yakni terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran dan Peran Aktif pimpinan dalam memberikan arahan, monitoring dan evaluasi ketatausahaan lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Dan untuk **kendala pencapaian** pada tahun 2024 untuk anggaran Layanan Sarana Internal sebagian besar berasal dari PNPB

Analisis 3. Analisis capaian kinerja dan perbandingannya dengan capaian dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya

Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal telah dilaksanakan setiap tahun dari tahun 2020 -2024. setiap tahun Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah mencapai target yang telah diberikan dengan persentasi pencapaian 100% dengan hasil **sangat berhasil**. Layanan ini meliputi Layanan Perkantoran UPT, Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Sarana Internal.

sehingga tidak bisa melakukan kontrak diawal tahun Januari 2024 karena menunggu SE PNPB. Serta **perbaiki kinerja** kedepan selama pelaksanaan kegiatan harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Analisis 4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Table 20. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.358.335.000	750.000.000	608.335.000	44,78%
Layanan Perkantoran	31.101.691.000	-	30.992.495.543	99.65%
Layanan Sarana Internal	7.139.356.000	-	7.138.111.844	99.98%
TOTAL	39.599.382.000	750.000.000	38.738.942.387	97.82

NO	KEGIATAN	CAPAIAN				EFEKTIVITAS (D/C)	EFISIENSI (D/F)
		OUTPUT		ANGGARAN			
		2023	2024	2023	2024		
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%	100%	98.99%	97.82%	1	1,02

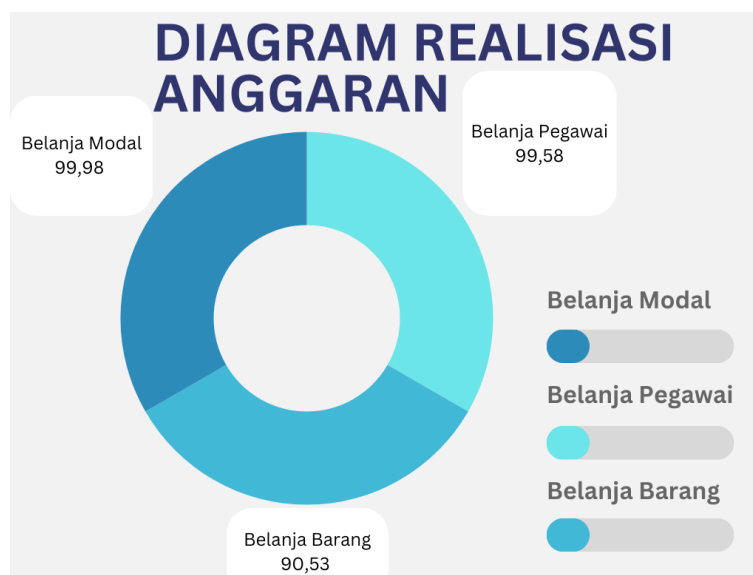
3.4. Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran awal sebesar 66.412.234.000. Selama tahun 2024, terdapat dua kali perubahan pagu anggaran, dengan pagu anggaran terakhir sebesar Rp 63.536.1044.000. Serapan Anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 mengalami **peningkatan** jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 99.31%. Serapan pada tahun 2024 sebesar 99.65% jika didasarkan pada data Sakti dan menyisakan anggaran sebesar Rp 212.558.650. Tetapi apabila menggunakan data pada OmSpan realisasi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan sebesar 95.54% dikarenakan terdapat pagu blokir sebesar 2.600.000.000, blokir anggaran yang dimaksud merupakan blokir AA (*Automatic Adjustment*) sebesar 1.150.000.000 dan blokir A (penghematan anggaran untuk perjadiin) sebesar 1.450.000.000 yang mana blokir anggaran tersebut masih

terdapat dalam pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya realisasi anggaran tahun 2024. Adapun realisasi anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Table 21. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Jenis belanja (Data Omspan)

Jenis belanja	Pagu awal	Revisi ke-2	Blokir	Realisasi	%
Belanja pegawai	26.366.000.000	27.675.870.000		27.560.814.955	99,58
Belanja barang	30.906.878.000	28.720.878.000	2.600.000.000	26.000.629.621	90,53
Belanja modal	9.139.356.000	7.139.356.000	-	7.138.111.844	99,98
Jumlah belanja	66.412.234.000	63.536.104.000	2.600.000.000	60.699.556.420	95,54



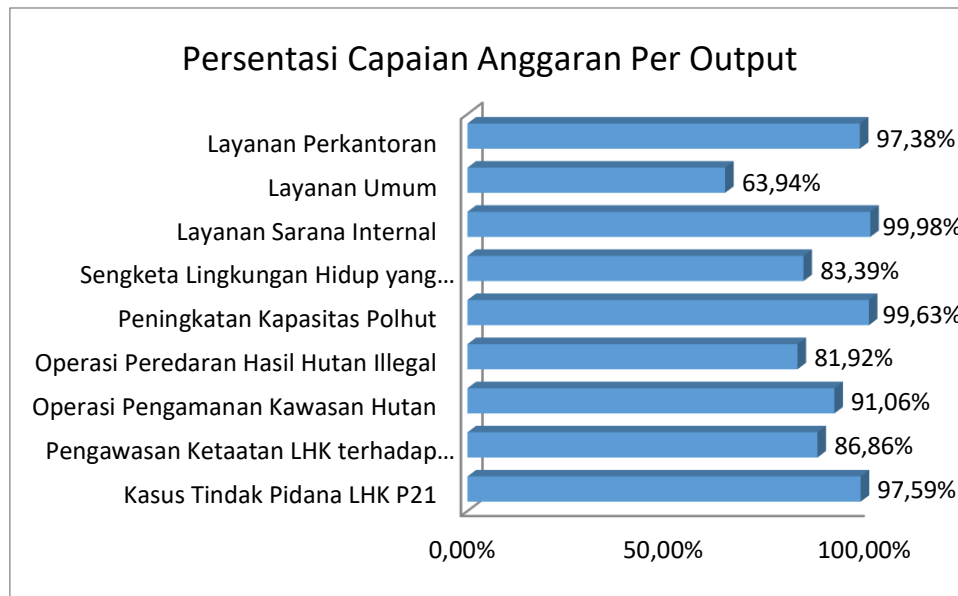
Gambar 17. Diagram Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024

Table 22. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 berdasar jenis belanja diluar blokir (Data Sakti)

Jenis belanja	Revisi ke-2	Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	%
Belanja pegawai	27.675.870.000	-	27.675.870.000	27.560.814.955	99,58
Belanja barang	28.720.878.000	2.600.000.000	26.120878.000	26.000.629.621	99,53
Belanja modal	7.139.356.000	-	7.139.356.000	7.138.111.844	99,98
Jumlah belanja	63.536.104.000	2.600.000.000	60.939.104.000	60.699.556.420	99,60

Table 23. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 Per Kegiatan (Data Omspan)

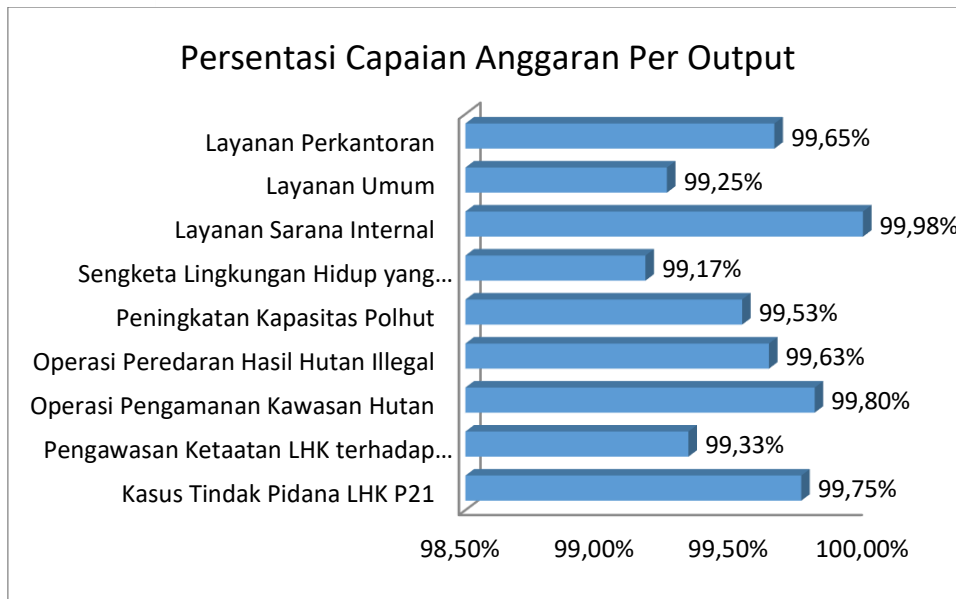
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Blokir	Realisasi	%
5429.QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	440.000.000	70.000.000	366.918.070	83,39
5430.QIH	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	4.070.139.000	500.000.000	3.535.492.772	86,86
5431.QCE	Kasus Tindak Pidana LHK P21	9.339.435.000	150.000.000	9.114.948.855	97,59
5428.DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	194.539.0000	-	193.632.800	99,63
5428.QHD	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	5.484.636.000	480.000.000	4.994.799.866	91,06
5428.QHD	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	3.657.973.000	650.000.000	2.996.840.988	81,92
5427.EBA	Layanan Umum	2.108.335.000	750.000.000	1.348.142.262	63,94
5427.EBA	Layan Perkantoran	31.101.691.000	-	30.992.495.543	97,38
5427.EBB	Layanan Sarana Internal	7.139.356.000	-	7.138.111.844	99,98
Jumlah		63.536.104.000	2.600.000.000	60.699.556.420	95,54



Gambar 18. Realisasi Capaian Anggaran Per Output

Table 24. Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2024 Per Kegiatan (Data Sakti)

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realisasi	%
5429.QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	440.000.000	70.000.000	370.000.000	366.918.070	99,17
5430.QIH	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	4.070.139.000	500.000.000	3.570.139.000	3.535.492.772	99,03
5431.QCE	Kasus Tindak Pidana LHK P21	9.339.435.000	150.000.000	9.189.435.000	9.114.948.855	99,19
5428.DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Hutan	194.539.0000	-	194.539.000	193.632.800	99,53
5428.QHD	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	5.484.636.000	480.000.000	5.004.636.000	4.994.799.866	99,80
5428.QHD	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	3.657.973.000	650.000.000	3.007.973.000	2.996.840.988	99,63
5427.EBA	Layanan Umum	2.108.335.000	750.000.000	1.358.335.000	1.348.142.262	99,25
5427.EBA	Layan Perkantoran	31.101.691.000	-	31.101.691.000	30.992.495.543	99,65
5427.EBB	Layanan Sarana Internal	7.139.356.000	-	7.139.356.000	7.138.111.844	99,98
Jumlah		63.536.104.000	2.600.000.000	60.681.383.000	60.699.556.420	99,65



Gambar 19. Realisasi Capaian Anggaran Per Output

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi terhadap seluruh Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kegiatan Terlaksananya Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal memiliki nilai rata-rata 120,00% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- b. Kegiatan Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK memiliki nilai rata-rata 103.84% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- c. Kegiatan terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P-21 memiliki nilai rata-rata 97.50% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- d. Kegiatan terselesaikannya Perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan memiliki nilai rata-rata 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- e. Kegiatan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilingkungan Ditjen Gakkum LHK memiliki nilai rata-rata 100% dengan penilaian capaian kinerja **sangat berhasil**.
- f. Realisasi pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2024 sebesar Rp 60.723.545.350 atau **99,65%** dari pagu anggaran sebesar Rp 60.936.104.00 dan masih terdapat pagu blokir tahun 2024 sebesar Rp 2.600.000.000.

4.2 Rekomendasi

- a. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM serta sarana dan prasana di semua bidang mutlak diperlukan agar peningkatan kinerja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dapat lebih optimal.
- b. Koordinasi dan kerjasama terhadap para pemangku kawasan dan para penegak hukum lainnya perlu ditingkatkan sehingga tujuan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan dapat tercapai lebih baik lagi.
- c. Membangun sistem informasi yang terintegrasi antara kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan izin, operasi pengamanan, sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum pidana guna mempercepat pengambilan keputusan.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan baik itu capaian anggaran maupun indikator kegiatan serta sarana prasarana pendukung.

LAMPIRAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Muhammad, S.Sos.M.H

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan



David Muhammad, S.Sos.M.H
NIP. 19730707 200003 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	
				Semula	Menjadi
1	Pencegahan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	20 Operasi	20 Operasi
			Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	12 Operasi	12 Operasi
			Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15 Orang	15 Orang
2	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Meningkatnya perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah perkara Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	2 Perkara	2 Perkara
3	Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	130 Badan Usaha	130 Badan Usaha
4	Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	40 Perkara	40 Perkara
5	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ditjen penegakan hukum LHK	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Ditjen PHLHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	96,41 Poin	81,00 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

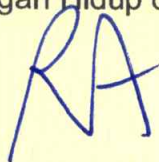
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO		Anggaran	
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi*
QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	20 Operasi	Rp6.675.140.000,00	Rp5.484.636.000,00
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	12 Operasi	12 Operasi	Rp4.157.457.000,00	Rp3.657.973.000,00
DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	15 Orang	Rp200.000.000,00	Rp194.539.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	2 Perkara	2 Perkara	Rp580.000.000,00	Rp440.000.000,00
QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001-Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	130 Badan Usaha	130 Badan Usaha	Rp4.205.620.000,00	Rp4.070.139.000,00
QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	40 Perkara	40 Perkara	Rp9.562.840.000,00	Rp9.339.435.000,00
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	Rp2.300.000.000,00	Rp2.108.335.000,00
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Rp29.591.821.000,00	Rp31.101.691.000,00
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	Rp9.139.356.000,00	Rp7.139.356.000,00
Total Anggaran				Rp66.412.234.000,00	Rp63.536.104.000,00

* Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp2.600.000.000,00 dikarenakan Kebijakan Nasional Automatic Adjustment dan Penghematan Perjalanan Dinas.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

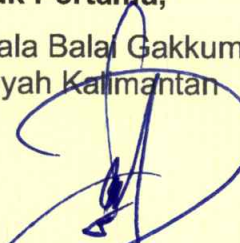
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan



David Muhammad, S.Sos.M.H
NIP 19730707 200003 1 001